



STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BIMA



Portal

LAPORAN KEUANGAN TA 2023 AUDITED

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bima

#2023
#HMP THRIVE



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 31 Desember 2023

Kepala,



Jonison Petrus, S.St.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA**

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmbima@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 31 Desember 2023

Kepala,



Jonison Petrus, S.St.Pi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.515.000,- atau mencapai 376 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.800.000,- Realisasi Belanja Negara pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.287.721.325,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.321.951.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.871.238.343,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp54.068.611,- dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.817.169.732,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp16.871.238.343,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.520.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.293.759.553,-

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.285.239.553,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.609.286,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.283.630.267,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.878.943.055,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp(5.283.630.267,-) ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(1.280.770,-) dan transaksi antar entitas senilai total Rp5.277.206.325,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp16.871.238.343,-

5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

Pada tahun anggaran 2023 disajikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp0,- yang telah direalisasikan sebesar Rp0,-. Penganggaran ini terkait adanya pandemi Covid-19.

6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2023. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% Thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.800.000	10.515.000	376	21.007.876
JUMLAH PENDAPATAN		2.800.000	10.515.000	376	21.007.876
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2.496.914.000	2.466.862.463	99	2.451.067.047
Belanja Barang	B.4	2.548.332.000	2.544.274.362	100	1.903.069.151
Belanja Modal	B.5	276.705.000	276.584.500	100	429.426.514
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		5.321.951.000	5.287.721.325	99	4.783.562.712

NOTED : Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

STASIUN KIPM BIMA
NERACA
UNTUK PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas pada BLU	C.3	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	-	-
Piutang PNBP	C.6	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	54,068,611	23,625,377
Jumlah Aset Lancar		54,068,611	23,625,377
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	9,696,151,000	9,696,151,000
Peralatan dan Mesin	C.17	6,248,877,683	6,388,597,983
Gedung dan Bangunan	C.18	6,538,768,567	6,488,818,567
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	73,681,500	73,681,500
Aset Tetap Lainnya	C.20	19,000,000	19,000,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(5,759,309,018)	(5,794,125,317)
Jumlah Aset Tetap		16,817,169,732	16,872,123,733
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		16,871,238,343	16,895,749,110
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	15,705,457	16,806,055
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15,705,457	16,806,055
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		15,705,457	16,806,055
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	16,855,532,886	16,878,943,055
JUMLAH EKUITAS		16,855,532,886	16,878,943,055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16,871,238,343	16,895,749,110

NOTED : Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		8.520.000	3.690.000
Pendapatan Badan Layanan umum		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		8.520.000	3.690.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.466.862.463	2.451.067.047
Beban Persediaan	D.3	131.620.463	96.015.637
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.498.911.824	1.320.556.209
Beban Pemeliharaan	D.5	271.405.508	230.800.219
Beban Perjalanan Dinas	D.6	595.087.278	269.419.451
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	329.872.017	664.593.419
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		5.293.759.553	5.032.451.982
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.285.239.553)	(5.028.761.982)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.995.000	3.500.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		385.714	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(5.091.630)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.609.286	(1.590.631)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.283.630.267)	(5.030.352.613)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-

NOTED : Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KIPM BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	16.878.943.055	17.146.338.997
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.283.630.267)	(5.030.352.613)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.280.770)	69.085
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(1.280.770)	
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	69.085
JUMLAH		11.594.032.018	12.116.055.469
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.277.206.325	4.762.887.586
EKUITAS AKHIR	E.5	16.871.238.343	16.878.943.055

NOTED : Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa, Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima berkomitmen dengan visi **“Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui impementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual”**.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga

dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem informasi yang yang andal dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Penanganan COVID-19

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 Stasiun KIPM Bima tidak menyajikan Anggaran dan belanja kegiatan dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pandemi yang melanda pada tahun 2020 membuat perubahan pada anggaran yang telah ditetapkan. Penyesuaian dengan kondisi pandemic Covid-19 ini, Stasiun KIPM Bima telah mengakomodir anggaran untuk penanganan pandemi dengan realisasi belanja pendukung penanganan covid-19 berupa masker, hand sanitizer, *face shield*, sarung tangan, vitamin, suplemen penambah daya tahan tubuh, dan jasa uji pemeriksaan covid-19 untuk pegawai.

Kebijakan pelayanan juga mengacu kepada prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Badan KIPM dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 berupa tata cara pelayanan, penyediaan dan penggunaan masker, pencuci tangan, pengukur suhu tubuh, *face shield*, pengaturan jarak dan penyekatan ruang pelayanan dengan pengaman mika sebagai pencegahan kontak langsung antar pengguna jasa dan petugas pelayanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bimadalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima adalah sebagai

berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi

akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP ke PP 85 Tahun 2021 menjadi tarif Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	10.515.000	19.127.876	-45
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	10.515.000	19.127.876	-45

Realisasi

Belanja

Rp5.287.721.325,

-

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.287.721.325,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.496.914.000	2.466.862.463	99
Belanja Barang	2.548.332.000	2.544.274.362	100
Belanja Modal	276.705.000	276.584.500	100
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.321.951.000	5.287.721.325	99
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	5.321.951.000	5.287.721.325	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja Tahunan TA 2023 sebesar 99%.

Belanja

Pegawai

Rp2.466.862.463,

-

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.466.862.463,- dan Rp2.451.067.047,- atau terjadi peningkatan sebesar 1 persen dari TA yang lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	1,229,021,765	1,232,823,691	0
Belanja Honorarium	1,110,146,698	1,110,415,356	0
Belanja Lembur	127,694,000	107,828,000	18
Jumlah Belanja Kotor	2,466,862,463	2,451,067,047	1
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	2,466,862,463	2,451,067,047	1

Belanja Barang

Rp2.544.274.362,

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.544.274.362,- dan Rp1.903.069.151,- Realisasi tersebut mengalami Peningkatan sebesar 25 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	841,734,657	696,904,950	17
Belanja Barang Non Operasional	249,799,900	181,267,499	27
Belanja Jasa	424,183,322	438,982,238	-3
Belanja Pemeliharaan	253,637,008	226,410,319	11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	595,087,278	269,419,451	55
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	179,832,197	90,084,694	50
Jumlah Belanja Kotor	2,544,274,362	1,903,069,151	25
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	2,544,274,362	1,903,069,151	25

Belanja Modal

Rp226.634.500,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp226.634.500,- dan Rp429.426.514,- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 47 persen dibandingkan TA 2022. Penurunan belanja modal dikarenakan Pengadaan belanja modal direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Juni Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226,634,500	-	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	429,426,514	-100
Jumlah Belanja Kotor	226,634,500	429,426,514	-47
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	226,634,500	429,426,514	-47

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal tanah pada tahun anggaran 2023 maupun tahun anggaran 2022. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp226.634.500,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226,634,500	0	100
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	226,634,500	0	100
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	226,634,500	0	100

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.950.000,- dan Rp429.426.514,-.

*Perbandingan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	49.950.000	429.426.514	-75,97
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	429.426.514	-100

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 Demikian juga pada tahun anggaran 2022, tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi

Belanja Modal Tahunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Listrik	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Perbandingan Realisasi

Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	0	0	0,00
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Bantuan Sosial Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa

kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi
Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Sekretariat Utama	0	0	0
Penerima Bantuan melalui Deputi Sistem	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0
Penerima Bantuan melalui Deputi LKPP	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,- yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	0	0

Kas pada BLU Rp0,-

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas di BLU TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-

,

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya Di Hibah	-	-
Jumlah	0	0

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada eselon I disajikan dalam lampiran.

Piutang PNBP Rp0,-

C.6 Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	0	0

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBP pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0,-*

**C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian

Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No.	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		0	0

Rincian TP/TGR untuk masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

Bagian Lancar TPA Rp0,- **C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA per eselon I disajikan pada lampiran.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar Rp0,- **C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka
Rp0,-

C.10 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2023 dan 2022*

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah	0	0

Rincian Beban Dibayar di Muka berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima* Rp0,-

C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2023 dan 2022*

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	0	0

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I disajikan dalam lampiran.

Persediaan
Rp54.068.611,-

C.12 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp54.068.611,- dan Rp23.625.377,- dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Persediaan	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	1,913,984	3,177,377
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Barang Untuk pemeliharaan	73,500	-
Suku cadang	260,000	-
Bahan Baku	51,821,127	20,448,000
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	54,068,611	23,625,377

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0,-

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per eselon I disajikan dalam lampiran.

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,-

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0, - dan Rp0,-.

Rincian TPA per eselon 1 disajikan dalam lampiran.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang
Jangka Panjang Rp0,-

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp9.696.151,000,-

C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

adalah masing-masing sebesar Rp9.696.151.000,- dan Rp9.696.151.000,- Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	9,696,151,000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	9,696,151,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(5,470,745,774)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	4,225,405,226

Terdapat tanah pada:

- Tanah seluas 962 m² merupakan luasan tanah yang peruntukannya untuk gedung kantor Wilker Labuhan Bajo Provinsi NTT,
- Tanah seluas 3.565m² untuk gedung laboratorium Stasiun KIPM Bima serta.
- Tanah seluas 2.760 m² merupakan gedung wilker Sape kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peralatan dan Mesin
Rp6.248.877.683,-

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.248.877.683,- dan Rp6.388.597.983,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	6,388,597,983
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan nilai aset	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	6,248,877,683
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(5,035,676,576)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	1,213,201,107

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp6.538.768.567,-

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.538.768.567,- dan Rp5.339.392.453,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	5,339,392,453
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Koreksi pencatatan	-
Revaluasi aset gedung bangunan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	6,538,768,567
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(709,852,242)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5,828,916,325

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp73.681.500,-

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp73.681.500,- dan Rp73.681.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	73,681,500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Listrik	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	73,681,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13,780,200)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	59,901,300

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.000.000,-

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp19.000.000,- dan Rp19.000.000,-.

Saldo per 31 Desember 2022	19,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	19,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19,000,000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0,-

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Tidak terdapat KDP pada Tahun Anggaran 2023 terjadi karena sudah 100% pembayaran pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Laboratorium SKIPM Bima pada bulan Februari 2023.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp5.759.309.018,-

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp5.759.309.018,- dan Rp5.794.125.317,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 .

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6,248,877,683	5,035,676,576	1,213,201,107
2	Gedung dan Bangunan	6,538,768,567	554,737,905	5,984,030,662
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	73,681,500	13,780,200	59,901,300
4	Aset Tetap Lainnya	19,000,000	-	19,000,000
Akumulasi Penyusutan		12,880,327,750	5,604,194,681	7,276,133,069

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp0,-

C.23 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

No	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp -
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Prolehan per 31 Desember 2023		Rp -

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0,-

C.24 Aset Lain-Lain

Terdapat Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas

BLU yang dibatasi penggunaannya.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0,-

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	-	-	-
2	Paten	-	-	-
Jumlah		-	-	-
B	Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-
Total		-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp60.000.000,-

C.26 Uang Muka dari KPPN

Terdapat Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.000.000,- dan Rp0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp15.705.457,-

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.705.457,- dan Rp16.806.055,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima, Utang kepada

Pihak Ketiga terdiri dari Tagihan belanja langganan telepon, listrik, dan internet.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0,-*

C.28 Utang Yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan utang yang belum ditagihkan yang berasal dari pembelian barang persediaan yang di input pada BAST namun belum SPP dibulan September.

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan pada lampiran.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,-*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp0,-*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBK yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima berupa jasa pelatihan dan penyusunan neraca awal belum selesai dilaksanakan hingga tanggal pelaporan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada lampiran.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0,-

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Rp0,-

C.32 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Tidak terdapat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri berasal dari pembelian peralatan dan mesin, dan berada pada satker BLU di bawah Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas Rp16.855.532.886,-

C.33 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.855.532.886,- dan Rp16.878.943.055,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp8.520.000,-

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bima untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.520.000,- dan Rp1.810.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	-	-	-
Pendapatan Negara Buakan Pajak Lainnya	8,520,000	1,810,000	79
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	8,520,000	1,810,000	79
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	8,520,000	1,810,000	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-
Jumlah Pendapatan BLU	-	-	-
Jumlah	8,520,000	1,810,000	79

Beban Pegawai
Rp2.466.862.463,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.466.862.463,- dan Rp2.451.067.038,- dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1,229,021,765	1,232,823,682	-0.31
Beban Honorarium dan vakasi	1,110,146,698	1,110,415,356	0.00
Beban Lembur	127,694,000	107,828,000	0.00
Jumlah	2,466,862,463	2,451,067,038	1

Beban
Persediaan
Rp131.620.463,-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp131.620.463,- dan Rp23.625.377,- dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	69,810,393	3,177,377	95
Beban Persediaan pita cukai, materai & leges	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	61,810,070	20,448,000	67
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	131,620,463	23,625,377	82

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.514.617.281,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.514.617.281,- dan Rp1.320.556.209,- dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	841,679,157	701,080,210	20
Beban Barang Non operasional	249,799,900	181,567,499	27
Beban Langganan Daya dan Jasa	137,124,224	127,501,115	7
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	92,944,885	-100
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	0
Beban Jasa Konsultan	-	-	0
Beban Sewa	173,815,000	138,000,000	26
Beban Jasa Profesi	17,300,000	7,900,000	0
Beban Jasa Lainnya	94,899,000	71,562,500	25
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	0
Jumlah	1,514,617,281	1,320,556,209	15

Beban barang dan jasa pada tahun anggaran 2023, sehubungan dengan tidak adanya belanja penanganan covid-19, sehingga tidak ada Beban barang operasional Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp0,- dan Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp0,-.

Realisasi Penanganan Covid-19

URAIAN JENIS BEBAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Beban

Pemeliharaan

Rp271.405.508,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp271.405.508,- dan Rp230.800.219,- dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan**TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,745,000	97,499,000	18.6
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,892,008	128,911,319	3.9
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,118,500	2,994,400	104.3
Beban Persediaan suku cadang	11,650,000	1,395,500	0.0
Jumlah	271,405,508	230,800,219	17.6

Beban

Perjalanan Dinas

Rp595.087.278,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp595.087.278,- dan Rp269.419.451,- dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas**TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam kota	89,150,000	39,800,000	124
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,175,000	0	100
Beban Perjalanan Biasa	216,843,393	65,358,806	70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	258,918,885	164,260,645	58
Jumlah	595,087,278	269,419,451	121

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 sebesar Rp0,- sedangkan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,-. Adapun rincian beban untuk diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
Jumlah	0	0	0

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial baik pada Tahun Anggaran 2023 maupun Tahun Anggaran 2022

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp329.872.017,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp329.872.017,- dan Rp664.593.419,- dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	251,500,073	509,516,012	-51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77,236,976	153,193,182	-50
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	942,112	1,884,225	-50
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	192,856	-	100
Jumlah Penyusutan	329,872,017	664,593,419	-50
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	0
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	0
Jumlah Amortisasi	-	-	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	329,872,017	664,593,419	-50

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 dan 2022 termasuk adanya Aset tetap yang dihentikan penggunaan operasionalnya karena dalam kondisi rusak berat dan masih dalam pengajuan penghapusan.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022.

*Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.609.286,-*

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,995,000	3,500,999	-43
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	385,714	-	100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(5,091,630)	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,609,286	(1,590,631)	-201

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12. POS LUAR BIASA

Tidak terdapat Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal

Rp16.878.943.055,

-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp16.878.943.055,- dan Rp17.146.338.997,-

Perbandingan Rincian

Ekuitas Awal TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Awal	16.878.943.055	17.146.338.997	-1,58
Jumlah	16.878.943.055	17.146.338.997	-1,58

Defisit LO

Rp(5.299.335.724,

4,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp(5.299.335.724,-) dan Rp(5.030.352.613,-).

Perbandingan Rincian

Surplus/Defisit LO TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit LO	(5,299,335,724)	(5,030,352,613)	5
Jumlah	(5,299,335,724)	(5,030,352,613)	5

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Kesal

ahan Mendasar

Rp0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0,-*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- .

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp(1.280.770,-)*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(1.280.770,-) dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(1,280,770)	1,280,770	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Koreksi Lain-lain
Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Tidak terdapat Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp5.277.206.325
,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.277.206.325,- dan Rp4.762.554.836,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10,515,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,287,721,325
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5,277,206,325

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp5.287.721.325,- sedangkan DKEL sebesar Rp10.515.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- transfer masuk tersebut berasal dari Sertifikat Kesehatan Ikan (HC)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir

Rp16.855.532.886,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.855.532.886,- dan Rp16.878.943.055,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat Kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sampai pada 31 Desember 2023, DIPA Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2023 nomor SP DIPA- 032.13.2.649814/2023 Kode Digital Stamp (DS) DS : 8605-1416-7831-3020 tanggal 30 November 2022 dengan pagu awal sebesar Rp5.311.451.000,- telah mengalami sebanyak 6 kali revisi sebagai berikut :

1. Revisi 01 tanggal 15 Februari 2023 berupa Revisi Halaman III DIPA, pagu tetap Rp5.311.451.000,-
Kode DS tetap, DS : 8605-1416-7831-3020
2. Revisi 02 tanggal 15 April 2023 berupa Revisi ke DJA, pagu tetap Rp5.311.451.000,-
Kode DS tetap, DS : 8605-1416-7831-3020
3. Revisi 03 tanggal 02 Juli 2023 berupa Revisi Halaman III DIPA, pagu tetap Rp5.311.451.000,-
Kode DS berubah menjadi, DS : 4637-9523-4527-8101
4. Revisi 04 tanggal 20 Juli 2023 berupa Revisi POK, pagu tetap Rp5.311.451.000,-
Kode DS tetap, DS : 4637-9523-4527-8101
5. Revisi 05 tanggal 25 September 2023 berupa Revisi Halaman III DIPA, pagu tetap Rp5.311.451.000,-
Kode DS berubah menjadi, DS : 4637-9523-4527-8101
6. Revisi 06 tanggal 19 Oktober 2023 berupa Revisi ke DJA, pagu berubah menjadi Rp5.321.951.000,-
Kode DS berubah menjadi, DS : 0456-9031-5044-0042
7. Revisi 07 tanggal 01 Desember 2023 berupa Revisi ke DJA, pagu tetap Rp5.321.951.000,-
Kode DS tetap, DS : 0456-9031-5044-0042

F.3 PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Terdapat Hibah Tanah yang belum selesai, Lokasi Tanah di Labuan Bajo menunggu proses pemecahan, proses pengurusan nama dari sebelumnya Pemda Manggarai menjadi

Pemda Manggarai Barat.

2. Terdapat berita acara koreksi aset sebesar RP.49.950.000,- Rupiah di akibatkan dari ada nya kesalahan input pengadaan backdrop yang seharusnya menambah nilai aset nup 1 tetapi tercatat nup baru.
3. Penjelasan Capaian Output Strategis K/L Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Stasiun KIPM Bima sebagai berikut:

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN / Tematik (PN xx/ T)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran
1	3989.PDC	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	PN	10.000.000	10.000.000	100	1.00
2	3989.QIC	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PN	40.000.000	39.999.590	100	2.00
3	3988.PDC	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	PN	137.520.000	137.507.039	99.99	340
4	3988.PDF	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	PN	13.500.000	13.500.000	100	2.00
5	3988.QCE	Perkara pelanggaran peraturan perkarantina ikan yang di selesaikan	PN	14.432.000	4.423.300	99.94	2.00
6	3988.RAL	Sarana pengawasan karantina	PN	150.000.000	149.879.500	99.92	1.00
7	3990.PBR	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	PN	68.000.000	67.997.209	100	1.00
8	3990.PDD	a. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian	PN	65.000.000	64.999.497	100	1.00
		b. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	PN	53.000.000	51.999.413	98.11	1.00
9	3990.QDC	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	PN	135.000.000	135.000.000	100	110
10	3990.QIA	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	PN	11.000.000	10.999.028	99.99	1.00



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA 649814

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,321,951,000	5,287,721,325	(34,229,675)	99	4,783,888,000	4,783,562,712	(325,288)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA
Kepala



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	54,068,611	23,625,377	30,443,234	128.86
JUMLAH ASET LANCAR	54,068,611	23,625,377	30,443,234	128.86
ASET TETAP				
Tanah	9,696,151,000	9,696,151,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,248,877,683	6,388,597,983	(139,720,300)	(2.19)
Gedung dan Bangunan	6,538,768,567	6,488,818,567	49,950,000	0.77
Jalan, Irigasi dan Jaringan	73,681,500	73,681,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	19,000,000	19,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,064,555,292)	(5,794,125,317)	(270,429,975)	4.67
JUMLAH ASET TETAP	16,511,923,458	16,872,123,733	(360,200,275)	(2.13)
JUMLAH ASET	16,565,992,069	16,895,749,110	(329,757,041)	(1.95)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,705,457	16,806,055	(1,100,598)	(6.55)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,705,457	16,806,055	(1,100,598)	(6.55)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,705,457	16,806,055	(1,100,598)	(6.55)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,550,286,612	16,878,943,055	(328,656,443)	(1.95)
JUMLAH EKUITAS	16,550,286,612	16,878,943,055	(328,656,443)	(1.95)
JUMLAH EKUITAS	16,550,286,612	16,878,943,055	(328,656,443)	(1.95)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,565,992,069	16,895,749,110	(329,757,041)	(1.95)

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



JONISON PETRUS
198006122005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,913,984	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	73,500	0
0.0	117114	Suku Cadang	260,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	51,821,127	0
0.0	131111	Tanah	9,696,151,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,248,877,683	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,538,768,567	0
0.0	134113	Jaringan	73,681,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	19,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,262,743,761
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	787,089,218
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	14,722,313
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	15,705,457
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,287,721,325
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,515,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	16,878,943,055
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,280,770	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,995,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,820,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	1,700,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	851,669,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,629	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71,731,758	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,203,918	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	53,620,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	86,800	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	62,063,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	141,139,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,295,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	127,694,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,110,146,698	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	616,199,992	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,271,590	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,731,450	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102,036,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	36,440,125	0
3.0	521211	Beban Bahan	229,839,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,800,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	136,463,124	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	661,100	0
3.0	522141	Beban Sewa	173,815,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	17,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	94,899,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,745,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,892,008	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	216,843,393	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,150,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,175,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	258,918,885	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	478,567,258	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	154,473,952	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,884,225	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	192,856	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	69,810,393	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,118,500	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	11,650,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	61,810,070	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	385,714	0
JUMLAH			28,257,440,129	28,257,440,129

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



JONISCH PETRUS

183006122005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,287,721,325
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,515,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,995,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,820,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	1,700,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	851,669,720	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,635	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71,731,758	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23,203,918	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	53,620,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	86,800	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	62,063,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	141,139,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9,295,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	127,694,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,110,146,698	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	616,255,492	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85,271,590	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,731,450	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	102,036,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,440,125	0
3.0	521211	Belanja Bahan	229,839,900	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,800,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	91,951,000	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	87,881,197	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	137,559,322	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	610,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	173,815,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	17,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	94,899,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,745,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,892,008	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216,843,393	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,150,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,175,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260,817,986	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226,634,500	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	49,950,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,899,101
JUMLAH			5,300,135,432	5,300,135,432

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



JONISON PETRUS
198006122005021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:19 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,520,000	3,690,000	4,830,000	130.894
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,520,000	3,690,000	4,830,000	130.894
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,520,000	3,690,000	4,830,000	130.894
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,466,862,463	2,451,067,047	15,795,416	0.644
Beban Persediaan	131,620,463	96,015,637	35,604,826	37.082
Beban Barang dan Jasa	1,514,617,281	1,320,556,209	194,061,072	14.695
Beban Pemeliharaan	271,405,508	230,800,219	40,605,289	17.593
Beban Perjalanan Dinas	595,087,278	269,419,451	325,667,827	120.878
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:19 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	635,118,291	664,593,419	(29,475,128)	(4.435)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,614,711,284	5,032,451,982	582,259,302	11.57
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,606,191,284)	(5,028,761,982)	(577,429,302)	11.483
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,609,286	3,500,999	(1,891,713)	(54.034)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,995,000	3,500,999	(1,505,999)	(43.016)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	385,714	0	385,714	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(5,091,630)	5,091,630	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,091,630	(5,091,630)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,609,286	(1,590,631)	3,199,917	(201.173)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,604,581,998)	(5,030,352,613)	(574,229,385)	11.415
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,604,581,998)	(5,030,352,613)	(574,229,385)	11.415

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



JONISOL PETRUS
198005122005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2300) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : (649814) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:23 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,878,943,055	17,146,338,997	(267,395,942)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,604,581,998)	(5,030,352,613)	(574,229,385)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,280,770)	69,085	(1,349,855)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,280,770)	0	(1,280,770)	-
LAIN-LAIN	0	69,085	(69,085)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,277,206,325	4,762,887,586	514,318,739	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(328,656,443)	(267,395,942)	(61,260,501)	-
EKUITAS AKHIR	16,550,286,612	16,878,943,055	(328,656,443)	-

Keterangan :

FINAL

Bima, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala



JONISAN PETRUS
180006122005021001